

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian global saat ini berada dalam kondisi yang sangat dinamis dan rentan terhadap berbagai gejolak, salah satunya adalah dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Pandemi menyebabkan resesi dunia yang ditandai dengan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di banyak negara. Sebagaimana penelitian dari Bambang (2020), menyoroti bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya resesi global yang ditandai dengan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di setiap negara di dunia. Hal itu memicu peningkatan ketidakpastian ekonomi yang memengaruhi berbagai negara, termasuk Indonesia, yang bergantung pada stabilitas perdagangan internasional, investasi asing, dan permintaan domestik untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Pandemi Covid-19 menyebabkan guncangan ekonomi yang signifikan. Pembatasan sosial dan lockdown yang diterapkan di banyak negara mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi secara drastis (Harbani, 2022).

Salah satu dampak utama dari pandemi Covid-19 yakni terjadinya produksi menurun, barang menjadi langka, dan harga-harga meningkat, yang berujung pada inflasi. Sebagaimana kondisi Covid-19 berdampak pada perekonomian global yang diperoleh dari Binus.ac.id yaitu sebagai berikut:

Binus.ac.id- ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Selain itu, prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun akibat terganggunya penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan juga melemahnya keyakinan dari para pelaku ekonomi. Data Februari 2020 menunjukkan

berbagai indikator dini global seperti keyakinan pelaku ekonomi, Purchasing Manager Index (PMI), serta konsumsi dan produksi listrik menurun tajam.

Sumber: (<https://binus.ac.id/bandung/2021/09/dampak-covid-19-terhadap-perdagangan-international/>), diakses pada 30 Oktober 2024).

Bank Indonesia mendefinisikan inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu yang dampaknya meluas, sedangkan kebalikannya disebut deflasi (Bank Indonesia, 2024). Dampak inflasi sering kali pada kebutuhan pokok yang menyebabkan menambah tekanan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar penghasilannya digunakan untuk konsumsi (Bank Indonesia, 2024). Berikut tabel berisi data inflasi di Indonesia tahun 2020-2024:

**Tabel 1.1 Data Inflasi 2020-2024**

Periode	Dalam Bentuk (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Kuartal I</b>	2.87	1.43	2.29	5.24	2.79
<b>Kuartal II</b>	2.27	1.48	3.79	3.95	2.78
<b>Kuartal III</b>	1.43	1.57	5.19	2.87	2.03
<b>Kuartal IV</b>	1.57	1.76	5.36	2	1.61
<b>(yoy)</b>	1.68	1.87	5.51	2.61	2.30

Sumber: Bank Indonesia, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat inflasi pada *Year On Year* (yoy) tahun 2024 menunjukkan inflasi sebesar 2.30% yang termasuk dalam kategori terkendali. Angka ini berada dalam kisaran target Bank Indonesia 2024 sebesar  $2,5 \pm 1\%$  yang artinya bahwa target inflasi ideal berada dalam rentang antara 1,5% hingga 3,5%. Sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan namun, di tengah tekanan inflasi di berbagai negara maju, laju inflasi Indonesia pada tahun 2021 masih terkendali pada level yang rendah dan stabil,

sebagaimana yang dijelaskan dalam siaran pers oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia:

**ekon.go.id-** Di tengah tekanan inflasi di berbagai negara maju tersebut, laju inflasi Indonesia pada tahun 2021 masih terkendali pada level yang rendah dan stabil, serta berada di bawah kisaran target sebesar  $3\pm 1\%$  (yoy) yang telah ditetapkan. Realisasi inflasi pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy) atau naik dari realisasi tahun 2020 yang sebesar 1,68% (yoy). Hasil pengendalian ini tidak terlepas dari koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga.

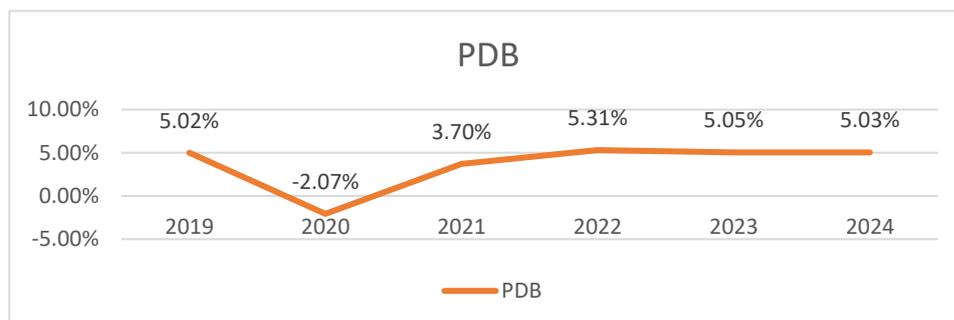
Sumber: (<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3578/ditengah-peningkatan-inflasi-global-laju-inflasi-indonesia-tahun-2021-tetep-terkendali-rendah-dan-stabil>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2024)

Kenaikan inflasi pada tahun 2022 salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengakibatkan terganggunya aktivitas jual beli yang berdampak pada pengunjung pasar dan toko menurun drastis sehingga aktivitas jual beli menjadi sangat sepi. Turunnya pendapatan dibandingkan dengan pendapatan normal sebelum pandemi menyebabkan pelaku usaha mengalami ketimpangan antara pendapatan dengan pengeluaran sebagaimana tingginya pengeluaran daripada pendapatan yang mengakibatkan pelaku usaha melakukan hutang bahkan mengalami bangkrut sehingga menutup toko (Pratama et al., 2021).

Terjadinya inflasi mengakibatkan nilai mata uang menurun, sebagaimana dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) bahwa inflasi terjadi karena beberapa faktor, sementara Badan Pusat Statistik mendefinisikan inflasi sebagai keadaan perekonomian di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa dalam jangka waktu panjang akibat ketidakseimbangan antara arus uang dan barang (DPJB, 2023). Inflasi yang terkendali berkontribusi positif

terhadap perekonomian, namun jika inflasi terlalu tinggi, dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama pada tahun 2016-2020, hal itu dikarenakan inflasi meningkat akibat pandemi Covid-19 telah memicu kenaikan harga BBM dan sembako, penurunan daya beli masyarakat, serta peningkatan angka pengangguran di Indonesia (Salim & Fadilla, 2021).

Pertumbuhan ekonomi umumnya diartikan sebagai peningkatan output total suatu negara dari waktu ke waktu, yang seringkali diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). PDB sendiri merupakan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu, mencerminkan aktivitas ekonomi yang terjadi. Peningkatan PDB biasanya menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi pada peningkatan dalam konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah gambar pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2019-2023:



**Gambar 1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia 2019-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari gambar grafik diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,31%. Hal itu disebabkan oleh *base*

*effect* dan *siklus commodity boom* atau ledakan komoditas, sebagaimana kondisi tersebut salah satunya dipicu oleh melambatnya ekonomi global dan fenomena El Nino (Nugroho, 2024). Sedangkan pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,03% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi yang mendorong menurunnya harga komoditas. Faktor yang sangat menentukan besarnya PDB ialah total populasi di suatu negara. Maka dari itu, PDB hanya mampu menggambarkan volume dan pertumbuhan ekonomi negara namun tidak mampu menggambarkan kenyataan-kenyataan riil kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

*Gini Ratio* adalah indikator yang mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dengan skala 0-1, semakin tinggi angka *gini ratio* maka semakin besar ketimpangan (Hasell, 2023). Sebagaimana pada laman website Pojok Ekonomi menyatakan sebagai berikut:

**pojokperekonomian.grobogan.go.id-** Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1 . Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”

Sumber: (<https://pojokperekonomian.grobogan.go.id/info-ekonomi/ekonomi-regional-grobogan/232-tingkat-ketimpangan-indeks-gini-2> , diakses pada tanggal 31 Oktober 2024)

Sebagai indikator ekonomi, indeks gini terdapat tiga kategori yakni rendah, moderat, dan tinggi. Gini Ratio membantu pemerintah dan pemangku kebijakan memahami tingkat kesenjangan pendapatan di masyarakat. Informasi ini penting untuk merancang kebijakan yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan

mendorong pemerataan ekonomi. Berikut adalah tabel rasio gini menurut provinsi dan daerah pada tahun 2024 yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan di berbagai wilayah Indonesia:

**Tabel 1.2 Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2024**

38 Provinsi	Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
	Per Maret 2024		
Aceh	0.325	0.258	0.294
Sumatera Utara	0.325	0.23	0.297
Sumatera Barat	0.31	0.228	0.283
Riau	0.345	0.267	0.307
Jambi	0.36	0.388	0.321
Sumatera Selatan	0.352	0.305	0.333
Bengkulu	0.413	0.275	0.342
Lampung	0.323	0.275	0.302
Kep. Bangka Belitung	0.263	0.196	0.244
Kep. Riau	0.351	0.24	0.349
DKI Jakarta	0.423	-	0.423
Jawa Barat	0.434	0.325	0.421
Jawa Tengah	0.399	0.31	0.367
DI Yogyakarta	0.44	0.349	0.435
Jawa Timur	0.387	0.325	0.372
Banten	0.357	0.254	0.353
Bali	0.364	0.287	0.361
Nusa Tenggara Barat	0.383	0.326	0.361
Nusa Tenggara Timur	0.281	0.305	0.316
Kalimantan Barat	0.34	0.259	0.31
Kalimantan Tengah	0.311	0.288	0.301
Kalimantan Selatan	0.329	0.255	0.302
Kalimantan Timur	0.325	0.289	0.321
Kalimantan Utara	0.258	0.273	0.264
Sulawesi Utara	0.364	0.334	0.36
Sulawesi Tengah	0.34	0.259	0.301
Sulawesi Selatan	0.373	0.325	0.363
Sulawesi Tenggara	0.392	0.33	0.37
Gorontalo	0.397	0.408	0.414
Sulawesi Barat	0.456	0.303	0.354
Maluku	0.277	0.233	0.282
Maluku Utara	0.343	0.275	0.316
Papua Barat	0.283	0.426	0.389
Papua Barat Daya	0.266	0.413	0.346
Papua	0.299	0.418	0.362
Papua Selatan	0.299	0.435	0.404
Papua Tengah	0.27	0.397	0.381
Papua Pegunungan	0.224	0.346	0.34
<b>Indonesia</b>	<b>0.399</b>	<b>0.306</b>	<b>0.379</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa *gini ratio* Indonesia per Maret 2024 sebesar 0.379. Gini Ratio tersebut menunjukkan penurunan dari 0.388 per Maret 2023. Daerah Istimewah Yogyakarta menjadi daerah dengan gini rasio

tertinggi pada total perkotaan dan pedesaan sebesar 0.435, yang masuk dalam ketimpangan moderat. Sedangkan provinsi dengan tingkat gini rasio pada total perkotaan dan pedesaan terendah yakni Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat gini rasio sebesar 0.244, yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Sedangkan, Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi tertinggi ke-8 dengan total perkotaan dan pedesaan sebesar 0.372, yang masuk dalam kategori ketimpangan moderat.

Penurunan *gini ratio* di Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia telah membaik dan berada di bawah level prapandemi, menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir (Antara, 2024). Penurunan ini memang memberikan indikasi positif bahwa adanya upaya aktivitas ekonomi domestik dan berbagai bantuan sosial pemerintah (Badan Kebijakan Fiskal, 2024). Namun, Tingginya gini rasio di beberapa provinsi mengindikasikan masih adanya ketimpangan ekonomi yang memerlukan perhatian khusus dalam kebijakan pemerataan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah perlu terus mendorong redistribusi dan kebijakan ekonomi inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan kelompok sosial secara berkelanjutan (Aberth, 2024).

Ketimpangan ekonomi di Indonesia menjadi isu yang kompleks di tengah tantangan global, terutama karena ketidak seimbangan distribusi sumber daya, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Sarjito, 2023). Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan ini adalah dengan memperkuat sektor Industri Kecil

dan Menengah (IKM). Sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesiatentang Perindustrian. Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah sektor ekonomi yang terdiri dari usaha kecil dan menengah yang beroperasi dalam skala terbatas, biasanya dikelompokkan berdasarkan jumlah tenaga kerja, modal, omset, dan aset yang dimiliki (bhuanajaya, 2023).

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. IKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengurangi ketergantungan pada sektor industri besar (Syaleha & Yasin, 2024). Dengan memberikan dukungan berupa akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta modernisasi teknologi bagi IKM, pemerintah dapat mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah. Pemberdayaan IKM yang efektif berpotensi menurunkan Gini Ratio karena pendapatan akan lebih terdistribusi secara merata di antara kelompok masyarakat. Sebagaimana jumlah populasi IKM yang diperoleh dari penulis Hilda B yaitu sebagai berikut:

**lestari.kompas.com-** Hal ini menyusul populasi IKM yang mencapai 4,19 juta unit usaha atau berkontribusi sebesar 99,7 persen dari total unit usaha industri di Indonesia, sehingga memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional. Dengan populasi tersebut, IKM turut andil terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebanyak 65,52 persen dari total tenaga kerja industri nasional. Selain itu, berkontribusi hingga 21,44 persen dari total nilai output industri, sehingga betul-betul berperan penting dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Sumber: (<https://lestari.kompas.com/read/2024/01/06/185735186/419-juta-ikm-serap-6552-persen-tenaga-kerja-industri-nasional?page=all>, diakses pada 05 Oktober 2024)

Provinsi Jawa Timur, selain termasuk dalam delapan besar dengan Gini Ratio tertinggi berdasarkan total perkotaan dan perdesaan, juga menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan jumlah perusahaan industri skala mikro dan kecil terbanyak di Indonesia pada tahun 2023. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah perusahaan industri skala mikro dan kecil menurut provinsi dengan jumlah tertinggi pada tahun 2023:

**Tabel 1.3 Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi Tertinggi 2023**

Provinsi	2023	
	Mikro	Kecil
<b>Jawa Timur</b>	862.057	115.414
<b>Jawa Barat</b>	584.903	56.736
<b>Jawa Tengah</b>	811.039	51.887
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	131.958	18.004
<b>DKI Jakarta</b>	69.072	10.920
<b>DI Yogyakarta</b>	129.289	4.736

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Bedasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2023 Provinsi Jawa Timur menempati peringkat teratas dengan jumlah perusahaan industri makro dan kecil terbanyak di Indonesia. Sebagaimana dalam tabel tersebut jumlah perusahaan industri Provinsi Jawa Timur skala mikro sebanyak 862.057 sedangkan skala kecil sebanyak 115.414. Kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat aktivitas ekonomi dan kontribusi sektor IKM sebagai penggerak roda perekonomian di wilayah tersebut. Berkembangnya IKM menciptakan banyak lapangan kerja di tingkat lokal. Sebagaimana pada laman [ekon.go.id](http://ekon.go.id), siaran pers dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sebagai berikut:

**ekon.go.id**- Para pelaku usaha diharapkan dapat mempertahankan semangat juang dalam berwirausaha agar bisa terus memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan secara umum bagi negara dengan membantu pergerakan roda perekonomian nasional.

Sumber: (<https://ekon.go.id/publikasi/detail/3049/pemerintah-dorong-ikm-untuk-terus-berkembang-dan-mendukung-pemulihan-ekonomi-nasional>, diakses pada 31 Oktober 2024)

Jumlah unit usaha dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal (Siman et al., 2024). Melalui pembelian bahan baku dan menggunakan jasa lokal, IKM mendistribusikan uang dalam komunitas, mendukung usaha lain, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) berperan penting dalam mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk. Dalam laporan akhir kajian pengembangan akses pasar dan kemitraan industri kecil dan menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa pengembangan sektor industri pengolahan difokuskan untuk menciptakan industri yang kompetitif dengan struktur yang solid, yang bertumpu pada sumber daya alam, inovasi, dan teknologi, serta menjunjung prinsip keadilan.. Dengan dukungan teknologi dan pelatihan, IKM dapat menghasilkan produk lebih kompetitif di pasar, yang berdampak pada peningkatan penjualan, pendapatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun, Industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, pasar, rendahnya kualitas manajemen, kurangnya inovasi, serta minimnya transformasi digital, yang semuanya menghambat daya saing mereka di pasar domestik dan internasional (Ernanda, 2023).

Kabupaten Mojokerto, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, termasuk dalam kawasan perkotaan Gerbangkertosusila yang berperan sebagai salah satu pusat perekonomian nasional (JDIH, 2022). Wilayah Kabupaten Mojokerto yang masuk dalam kawasan ini dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 (Perpres, 2022) mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Hal ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto dengan total 18 kecamatan, yaitu Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas, Ngoro, Pungging, Kutorejo, Mojosari, Bangsal, Mojoanyar, Dlanggu, Puri, Trowulan, Sooko, Gedeg, Kemlagi, Jetis, dan Dawarblandong. Letak strategis Kabupaten Mojokerto mendukung perkembangan sektor ekonomi dapat terlihat dari data berikut yang menunjukkan tingkat pertumbuhan industri di Kabupaten Mojokerto pada periode 2019-2023:

**Tabel 1.4 Tingkat Pertumbuhan Industri Kabupaten Mojokerto**

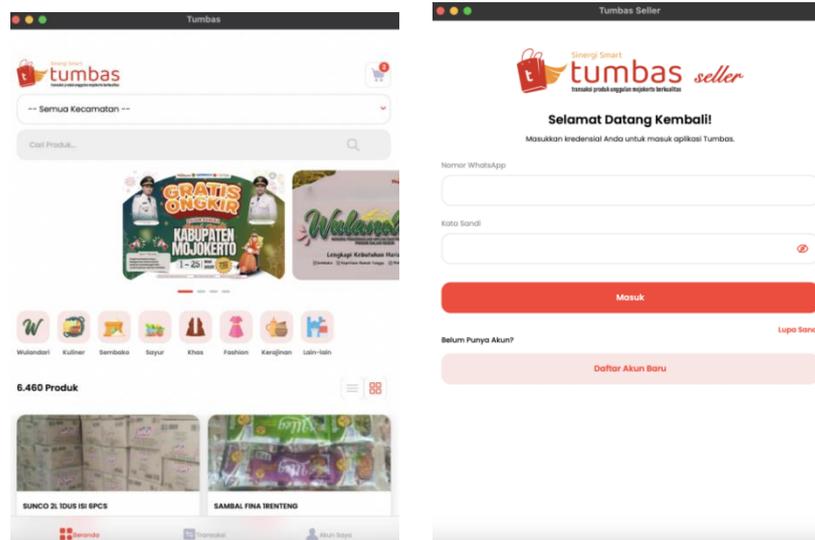
No	Jenis Industri	Jumlah Industri				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kecil	12090	12090	11610	15240	15644
2	Menengah	85	139	182	191	143
3	Besar	69	115	154	161	190
<b>Total</b>		<b>12244</b>	<b>12344</b>	<b>11946</b>	<b>15592</b>	<b>15977</b>

Sumber: Pendataan Industri Disperindang Kab. Mojokerto 2024

Berdasarkan tabel 1.4, dapat dilihat bahwasannya jumlah industri di Kabupaten Mojokerto cukup banyak, terutama pada jenis industri kecil. Pada jenis industri kecil mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 sebanyak 480. Penurunan terjadi akibat dari dampak pandemi covid-19, sebagaimana pelaku IKM mengalami penurunan jumlah omzet, bahkan gulung tikar. Pandemi covid-19

mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk memanfaatkan Dana Insentif Daerah (DID) 2021 guna membangun Aplikasi Sinergi Smart, yang tidak hanya sebagai *marketplace* untuk IKM tetapi juga sebagai sistem informasi perdagangan dan industri terpadu. Salah satu fitur yang dikembangkan dari Aplikasi Sinergi Smart yaitu “Tumbas” (Transaksi Produk Unggulan Mojokerto Berkualitas) yang digagas oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Mojokerto (Setiawan, 2022). Hal itu selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” serta sasaran dalam dokumen Renstra Perubahan Disperindag Tahun 2022-2026 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Industri dan Perdagangan.

Tujuan dari aplikasi “Tumbas” yakni transformasi pasar konvensional menjadi pasar digital yang menjadi wadah promosi produk bagi IKM dan memudahkan masyarakat umum dalam belanja online produk-produk dari IKM. Sebagaimana adanya pengembangan dari sebelumnya yang hanya bisa diakses melalui website resmi di [www.tumbas.mojokertokab.ac.id](http://www.tumbas.mojokertokab.ac.id), kini Aplikasi “Tumbas” dapat diunduh di App Store maupun di Play Store. Adapun berikut tampilan laman “Tumbas” konsumen dan *seller*:



**Gambar 1.2 Laman “Tumbas” Konsumen dan Seller Versi Mobile**  
 Sumber: <https://tumbas.mojokertokab.go.id/>, diakses 31 Oktober 2024

Gambar diatas merupakan tampilan aplikasi antara pembeli dan penjual. Dari tampilan aplikasi pembeli dapat dilihat bahwa jumlah produk per Mei 2025 sebanyak 6.460 produk yang ditawarkan. Hal ini terlihat adanya peningkatan dari jumlah produk yang ditawarkan pada tahun 2023 yakni sekitar 2.200 jenis produk yang ditawarkan, yang dijelaskan dalam laman berita Dinas Kominfo Provinsi Jatim berikut ini:

**kominfo.jatimprov.go.id-** Bupati Ikfina menyebut, di tahun 2023 ini, transaksi yang lewat aplikasi “Tumbas” sangat banyak, dan perputaran uang sudah puluhan juta, sedangkan jumlah produk sudah sekitar 2.200 jenis produk yang ditawarkan dalam aplikasi “Tumbas”. Ia pun optimistis aplikasi “Tumbas” ini akan terus berkembang pesat. Pihak pelaku ekonomi/pengusaha akan bekerja sama dan menggunakan aplikasi “Tumbas” dalam memasarkan produk.

Sumber: (<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/aplikasi-”Tumbas”-kabupaten-mojokerto-ikuti-kompetisi-inovasi-pelayanan-publik>, diakses pada 31 Oktober 2024)

Mengutip dari laman [mojokertokab.go.id](https://mojokertokab.go.id), dalam penilaian dari tim Kemenpan RB menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah berhasil membangun inovasi aplikasi “Tumbas” dengan sangat baik. Inovasi aplikasi

“Tumbas” Kabupaten Mojokerto masuk **10** besar diantara 375 inovasi berkelanjutan dan 74 replika dari seluruh daerah, hal tersebut juga tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 541 Tahun 2023 Tentang Pinalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023. Sedangkan, pada tahun 2024 aplikasi “Tumbas” masuk **5** besar inovasi terbaik nasional. Sebagaimana dalam website *radarmojokerto.jawapos.com* menyatakan:

**radarmojokerto.jawapos.com**- Sekaligus, untuk merayakan hari HUT ke-79 RI dan apresiasi masuknya lima besar terbaik nasional pemantauan keberlanjutan dan replikasi inovasi (PKRI) kemenpan RB.

Sumber: (<https://radarmojokerto.jawapos.com/politik-pemerintahan/824933926/aplikasi-”Tumbas”-masuk-lima-besar-inovasi-terbaik-nasional>, diakses pada 03 November 2024)

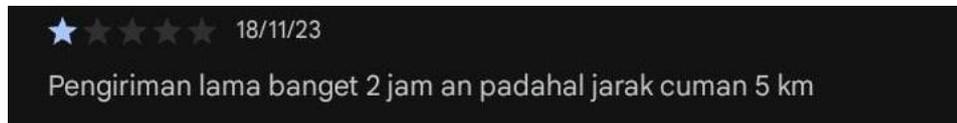
Program gratis ongkos kirim melalui *marketplace online* “Tumbas” yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto melibatkan beberapa aktor dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dalam buku Sinergi Smart yang di cetak oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto dan penelitian peninjauan yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa, Disperindag Kabupaten Mojokerto bertindak sebagai fasilitator utama yang menyediakan kebijakan dan dukungan promosi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto bertindak sebagai penyedia server aplikasi “Tumbas”, pelaku IKM lokal bertindak sebagai penyedia produk unggulan, konsumen bertindak sebagai aktor pembeli di aplikasi “Tumbas”, tim kurir sebagai aktor operasional yang memastikan pengiriman barang dari penjual ke pembeli, dan lembaga keuangan sebagai pencatatan transaksi keuangan dari

aktivitas jual-beli. Program gratis ongkir menunjukkan antusiasme tinggi yang terbukti pada promo gratis ongkir 1-17 Agustus 2024, tercatat transaksi senilai Rp 18,7 juta dengan 306 penjualan, di mana Kecamatan Dawarblandong menyumbang 71,9 persen dari total transaksi (Aliandu, 2024).

Program tersebut mencerminkan bahwa inovasi aplikasi “Tumbas” terindikasi berfungsi sebagai saluran koordinasi dan kerjasama antara aktor-aktor tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Program tersebut juga mengindikasikan adanya hubungan intensif dan terorganisasi antar pihak, dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sementara aktor lain berperan penting dalam mengintegrasikan peran masing-masing aktor dalam menjaga kelancaran jaringan kebijakan. Hal ini mengindikasikan beberapa dimensi dari konsep *policy network* menurut Frans Van Waarden (1992), dimensi aktor terwujud melalui keterlibatan berbagai pihak dengan karakteristik masing-masing yang saling melengkapi. Fungsi jaringan dimanfaatkan untuk akses informasi, negosiasi, koordinasi, dan kerjasama, yang bertujuan membangun stabilitas struktur jaringan. Selain itu, hubungan kekuasaan yang menciptakan integrasi dan pengelolaan sumber daya demi kelancaran *marketplace online* lokal.

Namun, inovasi *marketplace online* “Tumbas” masih dihadapkan beberapa permasalahan yang melibatkan berbagai kendala teknis dan operasional. Berdasarkan penelitian peninjauan yang peneliti lakukan bahwasanya, masalah utama terkait pengiriman seperti kesalahan pengiriman produk, kecepatan pengiriman yang lambat akibat kurangnya pelatihan bagi kurir serta keterbatasan

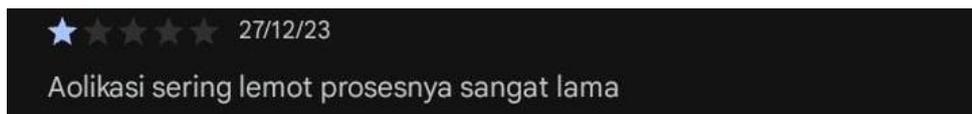
sumber daya manusia di wilayah tertentu. Hal ini tercermin dalam ulasan-ulasan di play store seperti berikut ini:



**Gambar 1.3 Pengaduan Konsumen Terkait Aplikasi “Tumbas” (1)**

Sumber: Ulasan “Tumbas” pada laman play store

Gambar diatas menyatakan bahwasanya, pengguna menyampaikan aduan atau kritik terhadap kecepatan pengiriman yang lama dengan jarak cukup dekat. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Jagad (2024) ditemukan bahwa, kendala dari aplikasi “Tumbas” adalah sering terjadinya kesalahan pengiriman barang, keterlambatan, serta kurangnya pemahaman tentang lokasi pengiriman di wilayah Kabupaten Mojokerto yang kompleks. Selain itu, berdasarkan penelitian peninjauan yang telah dilakukan, bahwa masih terdapat permasalahan terhadap sistem aplikasi yang mengalami gangguan teknis yang disebabkan oleh server atau pengelolaan IT yang belum optimal. Sebagaimana dalam gambar berikut ini:



**Gambar 1.4 Pengaduan Masyarakat Terkait Aplikasi “Tumbas” (2)**

Sumber: Ulasan “Tumbas” pada laman play store

Gambar diatas menyatakan bahwasanya, pengguna menyampaikan aduan atau kritik terhadap gangguan teknik pada aplikasi “Tumbas” yang menjadi lamban yang dapat mengganggu performa pengguna. Selain itu, berdasarkan penelitian peninjauan yang dilakukan menyatakan bahwa, evaluasi operasional yang dilakukan masih bersifat reaktif dan belum terstruktur, sehingga memperlambat penyelesaian permasalahan secara menyeluruh.

Ulasan-ulasan di atas menunjukkan adanya permasalahan dari ketidakpuasan pengguna terhadap pengalaman penggunaan aplikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi pelembagaan, aturan bertindak, dan strategi aktor dalam jaringan kebijakan menurut Frans Van Waarden (1992) perlu diperbaiki untuk memenuhi harapan pengguna dan meningkatkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan ekonomi dengan memperkuat sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Setelah melihat bentuk inovasi *marketplace online* “Tumbas” serta berbagai permasalahan yang terjadi, diperlukan analisis jaringan kebijakan untuk mencapai harapan pengguna dan meningkatkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan ekonomi dengan memperkuat sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM). Mengingat dalam pelaksanaan inovasi perlunya kerja sama antar berbagai aktor yang diharapkan untuk mendukung dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Menurut Muh Kabul (2024), untuk menganalisis dan mendeskripsikan jaringan kebijakan dapat mengidentifikasi dimensi jaringan kebijakan melalui dimensi aktor, fungsi jaringan, struktur jaringan, pelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memahami bagaimana jaringan kebijakan yang ada dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi peran kerja sama antar aktor secara komprehensif dalam mendukung keberhasilan inovasi “Tumbas”. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat judul ***“Policy Network Analysis Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) Melalui Inovasi Marketplace Online “Tumbas” di Kabupaten Mojokerto.***

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana *policy network analysis* dalam pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui inovasi *marketplace online* “Tumbas” di Kabupaten Mojokerto.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis *policy network analysis* dalam pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui inovasi *marketplace online* “Tumbas” di Kabupaten Mojokerto.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang teori *policy network* dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui inovasi *marketplace online* “Tumbas” di Kabupaten Mojokerto, serta diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung transformasi ekonomi dan perdagangan berbasis teknologi digital.

### 2. Manfaat Praktis

Sebuah kepuasan tersendiri jika penelitian ini mampu menjadi gambaran sebagai pengembangan aplikasi “Tumbas” untuk menyempurnakan fitur-fitur

dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku IKM serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendukung produk lokal melalui platform digital seperti “Tumbas”. Selain itu, masyarakat dapat lebih memahami peran mereka dalam membantu membangun kemandirian ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penggunaan *marketplace online*.